



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian serta seluruh aparat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejarah, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.

Namun disadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga buku Laporan Kinerja ini bermanfaat dan menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang. Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

**Plt. Kepala Dinas Komunikasi
Dan Informatika,**



JOHAR GUNAWAN, S.Pd., SE., M.M
Pembina
NIP. 19750319 200604 1 009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik selama Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik 2021-2026 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik 2025-2029 dapat dilihat hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 102.64% dengan kategori “Sangat Tinggi” dan rata-rata capaian anggaran sebesar 92.89% dengan kategori “Sangat Tinggi” dan efisiensi sebesar 9.5%

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 13 (tiga belas) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 4 target;
- Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 7 target;
- Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 2 target;

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam PAPBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 20.615.578.739. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 19.149.679.025,10 atau 92.89%.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	_____	i
Ringkasan Eksekutif	_____	iii
Daftar Isi	_____	iv
BAB I PENDAHULUAN	_____	1
A. Latar Belakang	_____	1
B. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik	_____	5
C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	_____	9
D. Isu Strategis	_____	11
E. Sistematika Pelaporan	_____	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	_____	17
A. Rencana Strategis	_____	18
B. Perjanjian Kinerja 2025	_____	20
C. Rencana Kerja & Anggaran Tahun 2025	_____	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	_____	25
1. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	_____	26
2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	_____	28
3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021 - 2026	_____	33
4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Rata - Rata Capaian Nasional/Prov.Jatim/Kab. Kota Lain	_____	36
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	_____	39
6. Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan	_____	44

7. Efektivitas Penggunaan Sumber Daya_____	49
8. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah_____	53
BAB IV PENUTUP_____	56
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Gresik beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2025.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 antara lain :

1. Memberikan informasi yang jelas/transparan dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dan hasil evaluasi diharapkan menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerjanya di tahun selanjutnya;

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator Dinas Komunikasi dan Informatika disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati Gresik yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

B. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

1. Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah :

“Dinas Komunikasi dan Informatika membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian”.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

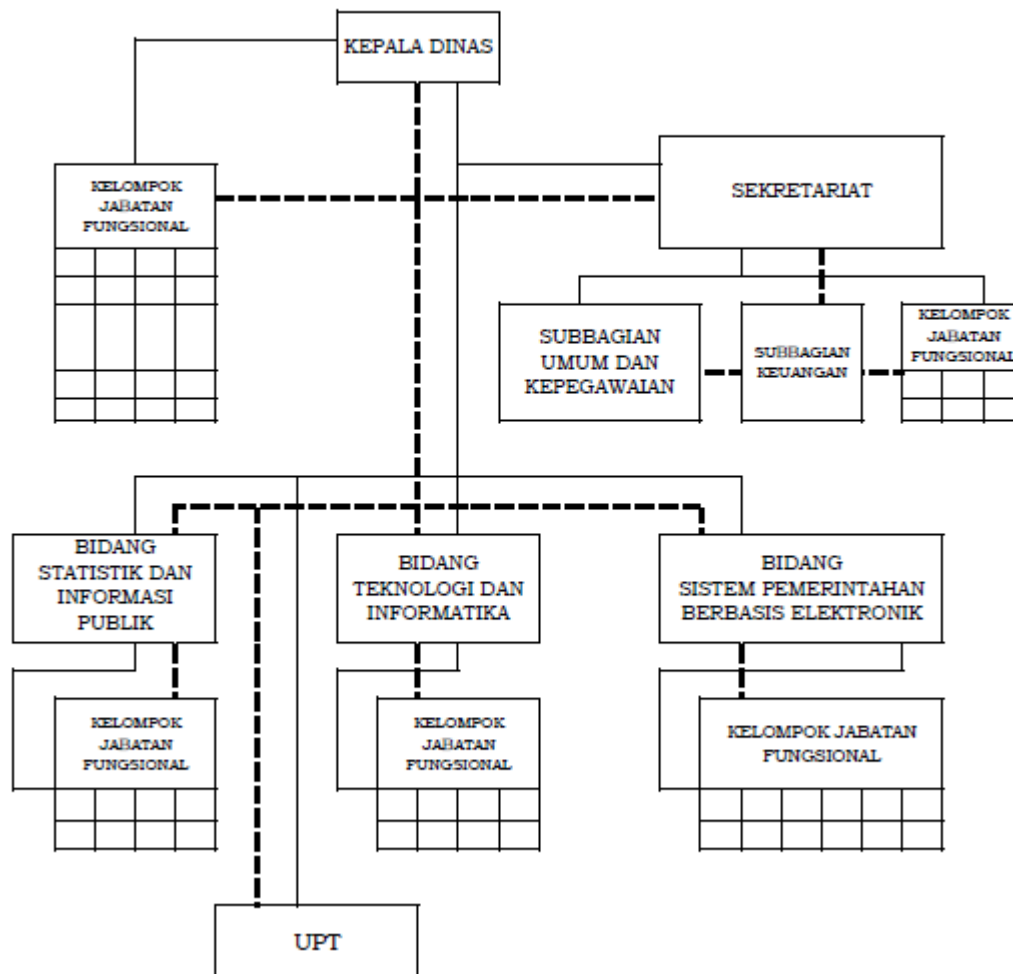
- e. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Perencana Ahli Muda;
- 3. Bidang Statistik dan Informasi Publik, terdiri atas :
 - a. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda;
 - b. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda;
- 4. Bidang Teknologi dan Informatika, terdiri atas :
 - a. Pranata Komputer Ahli Muda;
 - b. Sandiman Ahli Muda;
- 5. Bidang SPBE, terdiri atas :
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - b. Pranata Komputer Ahli Muda;
 - c. Pranata Komputer Ahli Pertama;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK**



4. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan dan berkompeten. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS DAN CPNS) yang terdiri dari pegawai struktural dan kelompok jabatan fungsional sebanyak 45 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik (per 31 Desember 2025)

No	Uraian	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	11
3	Bidang Teknologi dan Informatika	9
4	Bidang Statistik dan Informasi Publik	12
5	Bidang SPBE	12
Total		45

Tabel 1.2 Data Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik (per 31 Desember 2025)

N O	URAIAN	PENDIDIKAN								JML
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
1	Juru Muda (I/a)									
	Juru Muda Tingkat I (I/b)									
	Juru (I/c)									
	Juru Tingkat I (I/d)									
2	Pengatur Muda (II/a)									
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)			1						1
	Pengatur (II/c)					7				7
	Pengatur Tingkat I (II/d)									
3	Penata Muda (III/a)						14			14
	Penata Muda Tingkat I (III/b)						8			8
	Penata (III/c)						2			2
	Penata Tingkat I (III/d)						3	2		5

4	Pembina (IV/a)						2	5		7
	Pembina Tingkat I (IV/b)							1		1
	Pembina Utama Muda (IV/c)									
	Pembina Utama Madya (IV/d)									
	Pembina Utama (IV/e)									
	JUMLAH	0	0	0	0	7	29	8		45

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik
(per 31 Desember 2025)

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	-	-	-
II	4	4	8
III	13	16	29
IV	5	3	8
Jumlah	21	23	45

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2024

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor 700/2309.8/437.72/2025 Tanggal 14 Oktober 2025, maka bersama ini kami sampaikan bahwa :

1. Melengkapi dokumen DPA/DPPA, laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), laporan capaian bulanan yang telah diformalkan secara lengkap;
2. Melengkapi dokumen PK PAPBD Diskominfo (dari aplikasi SIAKRI) tahun 2025 dengan tanda tangan Kepala Daerah;
3. Melengkapi dokumen SK IKU dengan melampirkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tentang Indikator Kinerja Individu yang telah diformalkan oleh kepala daerah;
4. Melengkapi dokumen rencana aksi Diskominfo tahun 2025 dengan tanggal pengesahan;
5. Tahun 2024-2025 menggunakan indeks SPBE dilanjutkan dg indeks Pemerintahan Digital mulai tahun 2026-2029 berdasarkan surat KEMENPAN RB RI nomor : B/66/PD.02/2025 tentang Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada tahun 2025. Penentuan angka target indeks SPBE tahun 2025 didasarkan pada SE Sekda Propinsi Jatim Nomor : 000.7.2.2/14233/201.2/2025 tentang Pemutakhiran Penyelarasan Indikator Sasaran Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) pada RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029
6. -. Penyelesaian pengaduan menjadi kewenangan OPD terlapor, Diskominfo hanya sebatas verifikator aduan daerah
 -. Penyelesaian tindak lanjut pengaduan bergantung pada jenis pengaduan yang disampaikan masyarakat dan dilanjutkan ke OPD terlapor yang mana masing-masing memiliki ketentuan batas waktu penyelesaian yang berbeda (sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik), sehingga aduan yang disampaikan pada akhir tahun kemungkinan diselesaikan pada tahun berikutnya
 -. Pengelolaan pengaduan Kabupaten Gresik bergantung pada stabilitas aplikasi SP4N-LAPOR!, sehingga jika terjadi perbaikan aplikasi proses penyelesaian tindak lanjut aduan turut terdampak

7. Melampirkan bukti screenshot rekap tunjangan pada aplikasi Sipantas terhadap pegawai yang dikenakan pengurangan tunjangan penghasilan
8. Melakukan screensot pengukuran kinerja dari aplikasi SIAKRI
9. Melakukan screensot approval realisasi dan capaian bulanan pada aplikasi SIAKRI
10. Melampirkan laporan budaya kinerja organisasi.

D. ISU STRATEGIS

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang. Permasalahan utama atau isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

a. Implementasi SPBE

Implementasi SPBE di Kabupaten Gresik berkembang cukup signifikan, oleh karena itu perlu terus dikembangkan di berbagai aspek yang mendorong tercapainya efektivitas dan efisiensi kinerja dan pelayanan publik yang mencakup antara lain : Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan Berbasis Elektronik, infrastruktur, aplikasi dan kelembagaan pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Gresik. Aplikasi-aplikasi di seluruh OPD belum semuanya terintegrasi. Kebijakan SPBE belum mengikuti peraturan perundangan dan perkembangan teknologi, dalam hal Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE juga belum semuanya diterapkan berdasarkan kebijakan SPBE. Masih banyak layanan

Pemkab Gresik yang belum berbasis elektronik dan berjalan sendiri-sendiri (belum terpadu). Sangatlah *urgent* untuk dilakukan pengintegrasian sistem-sistem aplikasi yang ada di seluruh perangkat daerah, sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas dalam kinerja dan pelayanan publik, serta memperkecil kerentanan ekosistem IT. Tetap dikembangkannya infrastruktur TIK terutama jaringan TIK berbasis FO (*Fiber Optic*) sehingga dapat diwujudkan kecepatan pelayanan jaringan, sehingga kinerja OPD-OPD dan fungsi pelayanan publik dapat maksimal dan tetap dikembangkannya *Gresik Smart City*.

Maka diperlukan suatu upaya yang dapat meningkatkan pemanfaatan seluruh usaha penerapan teknologi dapat mengimbangi besarnya sumber daya yang telah dicurahkan. Diperlukan sebuah sistem yang dalam bahasa teknis memiliki tingkat skalabilitas yang tidak terbatas, bukan hanya usaha visualisasi dari data yang ada, melainkan penyusunan solusi lengkap yang dapat menjadi platform akuisisi data sampai diseminasinya, pengolah *Big-Data* hingga analisisnya, serta menjadi ruang digital kolaboratif bagi seluruh Perangkat Daerah hingga Pemimpin Daerah untuk dapat benar-benar memanfaatkan data dalam tindakan-tindakan pemerintahan. Platform yang dibutuhkan harus mampu menjadi jembatan dari seluruh proses bisnis sehingga memungkinkan penggunanya untuk melakukan *cross-tabulation* untuk menemukan relasi dari multivariable dari berbagai sumber data terstruktur maupun tidak terstruktur. Platform yang sama juga harus memanfaatkan penggunaan teknologi informasi geografis sehingga data pemerintahan dapat Perubahan Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 dilihat secara holistik untuk mendukung keputusan yang tepat guna. Pemerintah Kabupaten Gresik juga berharap dengan penyederhanaan tata kelola data ini dapat memberikan wawasan potensi penguatan PAD.

b. Data Center/Ruang Server

Dengan perkembangan teknologi digital 4.0 yang sangat pesat saat ini masyarakat dituntut untuk bergerak lebih cepat, praktis, efisien dan cenderung instan, sehingga Pemerintahan Kabupaten Gresik harus bergerak cepat, praktis, dan efisien. Kabupaten Gresik menjadi salah satu kabupaten di Indonesia dengan perubahan yang pesat, artinya sangat dibutuhkan tempat-tempat yang mempunyai fasilitas dengan kelengkapan sistem teknologi digital yang berstandar 4.0. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Ruang Server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang menjadi pusat penyimpanan informasi, aplikasi dan data dirasa memerlukan pembaruan mengingat kebutuhan data yang semakin meningkat dan menampung perangkat Teknologi Informasi yang semakin banyak. Dengan pembaruan serta peningkatan kapasitas dan standarisasi ruang server, diharapkan tingkat *availability*-nya naik, server dan *network uptime* meningkat, serta perangkat-perangkat yang ada di dalamnya dapat termitigasi dengan baik apabila terjadi insiden atau kejadian yang tidak diharapkan demi tercapainya Arsitektur SPBE Nasional yang terpadu dan terintegrasi. Langkah awal yang harus dilakukan untuk mencapainya adalah dengan tersedianya Data center yang terstandarisasi dengan tingkat *availability*, *uptime* server, dan perangkat jaringan yang memadai.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan IT

Keterbukaan dan kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat serta pemenuhan penyelenggaraan SPBE perlu diimbangi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas di bidang IT dengan mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai bidangnya. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terampil di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menghadapi *digital government* yang membutuhkan transformasi budaya kerja aparatur dan masyarakat.

d. Keamanan Informasi

Di Kabupaten Gresik sedang gencar-gencarnya melakukan penerapan manajemen keamanan informasi secara optimal melalui penyusunan tata kelola keamanan informasi untuk meningkatkan nilai Indeks Keamanan Informasi. Regulasi tentang keamanan informasi masih belum mengikuti peraturan perundangan dan perkembangan teknologi sehingga perlu disusun secara bertahap dan menyelaraskan dengan penerapan manajemennya. Selain itu perlu dilakukan juga pembinaan kepada masyarakat khususnya terkait pengetahuan dan teknologi keamanan informasi. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan dengan cara berkoordinasi ke Dinas Kominfo Provinsi atau dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penerapan keamanan informasi di Kabupaten Gresik akan lebih optimal jika didukung dengan anggaran yang memadai.

e. Satu Data Kabupaten

Data memegang peranan strategis dalam transformasi digital sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan dan kebijakan secara tepat. Koordinasi pengelolaan data melalui forum Satu Data perlu lebih digaungkan lagi ke seluruh pemangku kepentingan. Beberapa kendala dalam mewujudkan satu data antara lain :

- Kesiapan infrastruktur dan manajemen data yang belum memadai;
- Belum dilakukannya integrasi data dan masih terdapat permasalahan ego sektoral yang memungkinkan tersedianya data yang berbeda antar instansi;
- Munculnya keraguan antar instansi untuk berbagi akses data;
- Kurangnya SDM yang mampu mengelola data dengan baik;
- Terdapat beragam referensi dan standar data;
- Pemahaman kebijakan Satu Data belum dipahami secara merata.

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik selama tahun 2025, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta isu strategis Perangkat Daerah

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra dan Perjanjian Kiernaj APBD dan PAPBD Tahun 2025, Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025, analisis capaian kinerja dengan subbab berikut:

1. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja
2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya
3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Strategis
4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan rata-rata Capaian Nasional/Prov. Jatim/ Kab.Kota Lain
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
6. Efektifitas Penggunaan Sumber Daya
7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

BAB IV. PENUTUP

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan yaitu: Perjanjian Kinerja APBD dan PAPBD Tahun 2025 atau data lainnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai upaya mewujudkan kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- Pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- Pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- Pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada Tahun 2025, terdapat 2 periode Rencana Strategis yang berjalan yaitu Rencana Strategis yang berjalan yaitu Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Dalam Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, kinerja utama pada setiap periode akan dianalisis.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026, ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2025 yaitu:

- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan 5 Sasaran Strategis dengan 8 Indikator Kinerja Utama serta target Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matriks Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2021-2026

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	97.1%
		Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	213 informasi
		Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	3362 Konten
	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	90.25%
	Meningkatnya Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	100%
		Persentase aplikasi yang dimanfaatkan	75%

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
		oleh Perangkat Daerah	
	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	4 Rekomendasi
	Meningkatnya keamanan sistem elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	40 Aplikasi

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2025 yaitu:

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan 5 Sasaran Strategis dengan 8 Indikator Kinerja Utama serta target Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2025-2029

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan	Meningkatnya digitalisasi Layanan	Persentase digitalisasi layanan	43%
	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai keterbukaan informasi publik	40
		Persentase	97.10

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	informasi dan dokumentasi	pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan	
	Meningkatnya implementasi Persandian pada digitalisasi layanan	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan Persandian	15.78%
	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	100%

B. PERJANJIAN KINERJA 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029, maka target-target kinerja tahunan yang tercabntum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Knerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dalam 2 periode waktu, yaitu Perjanjian Kinerja APBD (Januari 2025) dan Perjanjian Kinerja PAPBD (Oktober 2025). Kinerja pada Perjanjian Kinerja APBD berdasarkan pada Renstra 2021-2026. Sedangkan Kinerja pada Perjanjian Kinerja PAPBD berdasarkan Renstra 2025-2029.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025
(Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026)

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	97.1%
		Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	213 informasi
		Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	3362 Konten
	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	90.25%
	Meningkatnya Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	100%
		Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	75%
	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	4 Rekomendasi
	Meningkatnya	Jumlah Aplikasi	40 Aplikasi

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
	keamanan sistem elektronik	yang sudah menerapkan keamanan informasi	

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025
(Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029)

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Meningkatnya digitalisasi Layanan	Persentase digitalisasi layanan	43%
	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi	Nilai keterbukaan informasi publik	40
		Persentase pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan	97.10
	Meningkatnya implementasi Persandian pada digitalisasi layanan	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan Persandian	15.78%
	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	100%

C. RENCANA KERJA & ANGGARAN TAHUN 2025

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 sebagai Berikut:

Program/Kegiatan	Pagu APBD	Pagu PAPBD	Selisih
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.007.017.318,50	6.561.853.500,00	-445.163.818,50
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,246,047.92	10.180.000,00	-2.066.47,92
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.919.819.018,58	5.554.973.900	-364.845.118
Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.443.052,00	137.190.400	-80.252.652
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	763.789.200,00	763.789.200	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.720.000,00	95.720.000	95.720.000
Program Informasi dan Komunikasi Publik	5.033.140.045,00	8.258.927.299	3.225.787.254
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	5.033.140.045,00	8.258.927.299	3.225.787.254

Program/Kegiatan	Pagu APBD	Pagu PAPBD	Selisih
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.856.475.498	5.669.169.540	-187.305.949
Pengelolaan E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.856.475.498	5.669.169.540	-187.305.949
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	67.844.272	62.940.400	-4.903.872
Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	67.844.272	62.940.400	-4.903.872
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	59.114.350	62.688.000	3.573.650
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	59.114.350	62.688.000	3.573.650
JUMLAH	18.023.591.483	20.489.950.339,00	2.466.358.856

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) APBD dan PAPBD Tahun 2025. Pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91 < 100%	Sangat Tinggi
2	76 < 90%	Tinggi
3	66 < 75%	Sedang
4	51 < 65%	Rendah
5	< 50%	Sangat Rendah

Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dilakukan dengan beberapa cara perbandingan yaitu:

1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

RENSTRA 2021-2026						
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	75%	75%	100%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	97.10%	96.8%	99.69%	Sangat Tinggi
		Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	213 Informasi dan Dokumentasi	263 Informasi dan Dokumentasi	110%	Sangat Tinggi
		Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	3362 Konten Positif	6205 Konten Positif	110%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	90.25%	96.68%	107.12%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100%	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya keamanan sistem elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	40 Aplikasi	40 Aplikasi	100%	Sangat Tinggi
Rata-rata					103.35	Sangat Tinggi

Dari 8 indikator kinerja utama, terdapat 8 IKU dengan kategori Sangat Tinggi. Secara rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar **103.35%** dengan kategori **Sangat Tinggi**.

RENSTRA 2025-2029						
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya digitalisasi Layanan	Persentase digitalisasi layanan	43%	43%	100%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi	Nilai keterbukaan informasi publik	40	89.67	110%	Sangat Tinggi
		Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	97.10%	96.8%	99.69%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya implementasi Persandian pada digitalisasi layanan	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan Persandian	15.78%	15.78%	100%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektor dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Rata-rata					101.93%	Sangat Tinggi

Dari 5 indikator kinerja utama, terdapat 5 indikator dengan kategori Sangat Tinggi. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar **101.93%** dengan kategori **Sangat Tinggi**.

2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

RENSTRA 2021-2026								
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Meningkat
		Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	75%	75%	Meningkat
2	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A	97.1%	96.68%	Menurun

RENSTRA 2021-2026								
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	
		Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	N/A	N/A	N/A	213 Informasi	263 Informasi	Meningkat
		Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	N/A	N/A	N/A	3362 Konten	6205 Konten	Meningkat
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	N/A	N/A	N/A	90.25%	96.68%	Meningkat

RENSTRA 2021-2026								
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	
4	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	N/A	N/A	N/A	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	Meningkat
5	Meningkatnya keamanan sistem elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	N/A	N/A	N/A	30 Aplikasi	40 Aplikasi	Meningkat

Dari 8 indikator kinerja utama, terdapat 7 indikator dengan realisasi yang rata-rata meningkat selama periode 2021-2025 dan 1 indikator dengan realisasi rata-rata menurun selama periode 2021-2025. Secara keseluruhan, performa indikator kinerja utama selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif. Dengan 87.5% indikator mengalami kenaikan dan 12.5% mengalami penurunan

RENSTRA 2025-2029					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Ket
			Baseline (2024)	2025	
1	Meningkatnya digitalisasi Layanan	Persentase digitalisasi layanan	41%	43%	Nilai sama dengan 2024
2	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi	Nilai keterbukaan informasi publik	40	89.67	Meningkat
		Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	97.10%	96.8%	Menurun
3	Meningkatnya implementasi Persandian pada digitalisasi layanan	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan Persandian	15.78%	15.78%	Nilai sama dengan 2024

RENSTRA 2025-2029					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Ket
			Baseline (2024)	2025	
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektorial dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	100%	100%	Nilai sama dengan 2024

Dari 5 indikator kinerja utama, terdapat 3 indikator dengan realisasi yang rata-rata sama dengan tahun 2024, 1 indikator menurun dan 1 indikator dengan realisasi meningkat selama periode 2025-2029. Secara keseluruhan, performa indikator kinerja utama selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif. Dengan 80% indikator mengalami kenaikan dan 20% mengalami penurunan

3. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS

RENSTRA 2021-2026					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	100%	100%	+
		Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	75%	75%	+
2	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	92.4%	96.8%	+
		Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	151 informasi dan dokumentasi	263 informasi dan dokumentasi	+
		Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	1830 konten positif	6205 Konten positif	+
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	90%	96.68%	+

RENSTRA 2021-2026					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
	Informatika (TI)				
4	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	4 rekomendasi	4 rekomendasi	+
5	Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	40 Aplikasi	40 Aplikasi	+

Dari 8 indikator kinerja utama, terdapat 8 indikator mengalami tingkat kemajuan.

RENSTRA 2025-2029					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya digitalisasi Layanan	Persentase digitalisasi layanan	52%	43%	-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi	Nilai keterbukaan informasi publik	70	89.67	+
		Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	97.10%	96.8%	-

RENSTRA 2025-2029					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
3	Meningkatnya implementasi Persandian pada digitalisasi layanan	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan Persandian	30.33%	15.78%	-
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	100%	100%	+

Dari 5 indikator kinerja utama, Terdapat 2 indikator telah melebihi target akhir 2025-2029 dan 3 indikator lainnya masih dibawah target akhir renstra 2025-2029. Secara keseluruhan, performa indikator kinerja utama dibandingkan dengan target akhir renstra 2025-2029 menunjukkan tren negatif, karena 60% indikator masih dibawah target akhir, sedangkan 40% indikator sudah melebihi target akhir renstra 2025-2029.

4. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN RATA-RATA CAPAIAN NASIONAL/PROV.JATIM/KAB.KOTA LAIN

RENSTRA 2021-2026					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Prov. Jatim/Kab.Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	N/A	100%	Tidak bisa dibandingkan
		Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	N/A	75%	Tidak bisa dibandingkan
2	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	N/A	96.8%	Tidak bisa dibandingkan
		Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	N/A	263 informasi dan dokumentasi	Tidak bisa dibandingkan
		Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	N/A	6205 Konten positif	Tidak bisa dibandingkan
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	N/A	96.68%	Tidak bisa dibandingkan

RENSTRA 2021-2026					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Prov. Jatim/Kab.Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
	Teknologi Informatika (TI)				
4	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	N/A	4 rekomendasi	Tidak bisa dibandingkan
5	Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	N/A	40 Aplikasi	Tidak bisa dibandingkan

Dari 8 indikator kinerja utama, tidak ada indikator yang bisa dibandingkan dengan Provinsi/Kabupaten Kota lain karena tidak terdapat data resmi.

RENSTRA 2025-2029					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Prov. Jatim/Kab.Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Meningkatnya digitalisasi Layanan	Persentase digitalisasi layanan	N/A	43%	Tidak bisa dibandingkan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi	Nilai keterbukaan informasi publik	99.90 (Kota Surabaya)	89.67	Lebih rendah
		Persentase Pengaduan	N/A	96.8%	Tidak bisa

RENSTRA 2025-2029					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Prov. Jatim/Kab.Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
		Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan			dibandingkan
3	Meningkatnya implementasi Persandian pada digitalisasi layanan	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan Persandian	N/A	15.78%	Tidak bisa dibandingkan
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektorial dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	N/A	100%	Tidak bisa dibandingkan

Dari 5 indikator kinerja utama, terdapat 1 indikator dengan nilai lebih rendah daripada Kota Surabaya. Sedangkan 4 indikator lainnya tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi/Kabupaten Kota lain karena tidak terdapat data resmi.

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

RENSTRA 2021-2026				
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kega galan	Solusi
1	Meningkat nya Tingkat Kematang an Kapabilitas Proses SPBE	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	Faktor penunjang: adanya program kerja SPBE	nihil
		Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	Faktor penunjang: adanya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor 043/2013/437.87/20 24 Tanggal 20 Desember 2024 Perihal Pedoman Pembangunan / Pengembangan Aplikasi	nihil
2	Meningkat nya Informasi dan Komunikas i Publik Pemerinta h Daerah yang Disediakan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	Faktor Penghambat: Aplikasi SP4N-Lapor beberapa kali mengalami gangguan teknis, sehingga menghambat pengelolaan pengaduan	-. Tindak lanjut aduan menjadi kewenangan OPD terdisposisi, Diskominfo sebagai pejabat pelaksana pengaduan daerah yang mana secara fungsi hanya memiliki kewenangan untuk mendistribusikan dan memantau

RENSTRA 2021-2026				
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kega galan	Solusi
				pengaduan yang masuk ke daerah
		Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	Faktor penunjang: Telah tersusunnya SK DIDP beberapa OPD	nihil
		Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	Faktor penunjang: Banyaknya kegiatan OD dan kepala daerah	nihil
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	Faktor Penunjang: Pihak Komdigi tanggap dalam menangani gangguan pada PDN	nihil
4	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	Faktor penunjang: Terdapat dokumen analisis data statistik sektoral tiap bulan	nihil
5	Meningkatnya Keamanan	Jumlah Aplikasi yang sudah	Faktor penunjang:	nihil

RENSTRA 2021-2026				
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kega galan	Solusi
	Sistem Elektronik	menerapkan keamanan informasi	Sudah terdapat list daftar aplikasi yang di pentest	

RENSTRA 2025-2029				
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kega galan	Solusi
1	Meningkat nya digitalisasi Layanan	Persentase digitalisasi layanan	Faktor penunjang: Adanya SK Bupati Gresik Nomor 043/305/HK/437.12/2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2023 – 2026	nihil
2	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	Faktor penunjang: Nilai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dicapai melalui kelengkapan regulasi,	nihil

RENSTRA 2025-2029				
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kega galan	Solusi
			tersedianya dokumen pendukung SAQ yang sesuai standar pelayanan informasi publik dan relevan, serta komitmen pimpinan dalam memastikan keterbukaan informasi publik yang optimal.	
		Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	Faktor Penghambat: Aplikasi SP4N-Lapor beberapa kali mengalami gangguan teknis, sehingga menghambat pengelolaan pengaduan	-. Tindak lanjut aduan menjadi kewenangan OPD terdisposisi, Diskominfo sebagai pejabat pelaksana pengaduan daerah yang mana secara fungsi hanya memiliki kewenangan untuk mendistribusikan dan memantau pengaduan yang masuk ke daerah
3	Meningkat nya implement asi Persandia n pada	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan Persandian	Faktor penunjang: Sudah diperbaikinya aplikasi yang telah	nihil

RENSTRA 2025-2029				
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kega galan	Solusi
	digitalisasi layanan		dilakukan pengujian keamanan	
4	Meningkat nya kualitas pengelolaa n data statistik	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektorial dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Faktor penunjang: Terdapat dokumen perencanaan, monitoring, dan evaluasi pada setiap Perangkat Daerah	nihil

6. ALOKASI ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN

RENSTRA 2021-2026						
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	32.47%	Rp. 6.694.247.950,00	Rp. 6.355.799.152,10	94.94%
		Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	3.45%	Rp. 712.162.850,00	Rp. 695.312.098,00	94.63%
2	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	2.78%	Rp. 574.040.000,00	Rp. 569.435.352,00	99.20%
		Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	0.29%	Rp. 60.333.000,00	Rp. 51.695.757,00	85.68%

RENSTRA 2021-2026						
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
		Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	36.98%	Rp. 7.624.554.299,00	Rp. 6.621.684.726,00	86.68%
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	23.40%	Rp. 4.824.612.240,00	Rp. 4.703.821.922,00	98.06%
4	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	0.31%	Rp. 62.940.400,00	Rp. 62.446.518,00	99.22%
5	Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	0.30%	Rp. 62.688.000,00	Rp. 62.483.500,00	99.67%

RENSTRA 2021-2026						
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
Jumlah				Rp. 20.615.578.739	Rp. 19.149.679.025,10	92.89%

Dari 8 indikator kinerja utama Renstra 2021-2026, terdapat 6 indikator dengan realisasi anggaran kategori sangat tinggi, 2 indikator dengan realisasi anggaran kategori tinggi. Secara rata-rata capaian anggaran pada Tahun 2025 adalah sebesar **92.89%**.

RENSTRA 2025-2029						
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1	Meningkatnya digitalisasi Layanan	Persentase digitalisasi layanan	59.33%	Rp. 12.231.023,040,00	Rp. 11.781.993.172,10	96.33%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan	Nilai keterbukaan informasi publik	37.28%	Rp. 7.684.887.299,00	Rp. 6.673.380.483,00	86.84%

RENSTRA 2025-2029						
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
	dokumentasi	persentase pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan	2.78%	Rp. 574.040.000	Rp. 569.435.352	91,07%
3	Meningkatnya implementasi Persandian pada digitalisasi layanan	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan Persandian	0.30%	Rp. 62.688.000,00	Rp. 62.483.500,00	99,67%
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik Sektoral yang Disediakan	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	0.31%	Rp. 62.940.400,00	Rp. 62.446.518,00	99.21%
				Rp. 20.615.578.739,00	Rp. 19.149.679.025,10	92.89%

Dari 5 indikator kinerja utama Renstra 2025-2029, terdapat 4 indikator dengan realisasi anggaran kategori sangat tinggi, 1 indikator dengan realisasi anggaran kategori tinggi. Secara rata-rata capaian anggaran pada Tahun 2025 adalah sebesar **92.89%**.

7. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Perhitungan efektivitas penggunaan sumber daya menggunakan rumus dibawah. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dengan batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Dari perhitungan diatas dapat dijabarkan pada 2 tabel dibawah:

RENSTRA 2021-2026					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian PAPBD	Efisiensi
1	Meningkatnya Tingkat	Persentase pelaksanaan	100%	94.94%	5.06

RENSTRA 2021-2026					
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian PAPBD	Efisiensi
	Kemampuan Kapabilitas Proses SPBE	kebijakan SPBE yang dievaluasi			
		Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	100%	94.63%	2.37
2	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	99.69%	99.20%	0.49
		Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	110%	85.68%	22.11
		Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	110%	86.68%	21.05
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	107.12%	98.06%	8.98
4	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang	100%	99.22%	0.78

RENSTRA 2021-2026					
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian PAPBD	Efisiensi
		disediakan			
5	Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	100%	99.67%	0.33
TOTAL			103.35%	90.49%	10.12

Dari 8 indikator kinerja utama renstra 2021-2026, terdapat 6 indikator yang efisien dan 2 indikator yang tidak efisien. Secara keseluruhan efektivitas penggunaan sumber daya pada renstra 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika sudah efisien dalam penggunaan sumber daya dengan nilai efisiensi sebesar 10.12%.

RENSTRA 2025-2029					
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian PAPBD	Efisiensi
1	Meningkatnya digitalisasi Layanan	Persentase digitalisasi layanan	100%	96.33%	3.67
2	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi	Nilai keterbukaan informasi publik	110%	86.84%	21.06
		persentase	99.69%	91,07%	0.49

RENSTRA 2025-2029					
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian PAPBD	Efisiensi
		pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan			
3	Meningkatnya implementasi Persandian pada digitalisasi layanan	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan Persandian	100%	99,67%	0.33
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik Sektoral yang Disediakan	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	100%	99.21%	0.78
TOTAL			101.93%	94.62%	8.88

Dari 5 indikator kinerja utama renstra 2025-2029, terdapat 4 indikator yang efisien dan 1 indikator yang tidak efisien. Secara keseluruhan efektivitas penggunaan sumber daya pada renstra 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika sudah efisien dalam penggunaan sumber daya dengan nilai efisiensi sebesar 8.88%.

8. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

RENSTRA 2021-2026			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan Penunjang
1	Meningkatnya Tingkat Kematanngan Kapabilitas Proses SPBE	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika - Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika - Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya	Persentase Ketersediaan	- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika - Pengelolaan E-Government di Lingkup

RENSTRA 2021-2026			
N o	Sasaran Strategi s	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan Penunjang
	Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Layanan Pusat Data	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	- . Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral - . Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
5	Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	- . Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi - . Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

RENSTRA 2025-2029			
N o	Sasaran Strategi s	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan Penunjang
1	Meningkatnya digitalisasi Layanan	Persentase digitalisasi layanan	- . Program Pengelolaan Aplikasi Informatika - . Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

RENSTRA 2025-2029			
N o	Sasaran Strategi s	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan Penunjang
2	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi	Nilai keterbukaan informasi publik	- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3	Meningkatnya implementasi Persandian pada digitalisasi layanan	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan Persandian	- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2025. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 5 (lima) sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik selama tahun 2025 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terdapat 4 sasaran yang menunjukkan keberhasilan sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat realisasi yang telah dicapai, maka secara umum kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target pada renstra 2021-2026, dari 8 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja, ada 8 indikator kinerja sasaran yang kinerjanya sama dengan atau lebih dari 100% sehingga mencapai kategori sangat tinggi. Untuk pencapaian target pada Renstra 2025-2029 dari 5 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja, ada 5 indikator kinerja sasaran yang kinerjanya sama dengan atau lebih dari 100% sehingga mencapai kategori sangat tinggi.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi belanja daerah PAPBD Tahun 2025 sebesar Rp 20.615.578.739,- dan Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 19.149.679.025,- atau 92,89%. Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya kerjasama dari semua pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika serta adanya upaya/solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2025 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran kinerja tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi terbaik untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi

Dan Informatika



JOHAR GUNAWAN, S.Pd., SE., M.M

Pembina

NIP. 19750319-200604 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. NINIK ASRUKIN, M.M.

Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dra. NINIK ASRUKIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650307 199703 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	1	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	100 persen
		2	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	75 persen
2	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan	1	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	97.1 persen
		2	Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	213 informasi
		3	Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	3362 Konten
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	1	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	90.25 persen
4	Meningkatnya Data Statistik Sektorial yang Disediakan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	4 rekomendasi
5	Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik	1	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	40 Aplikasi

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7,007,017,319.00	APBD
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp. 5,033,140,045.00	APBD
3	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 925,352,081.00	APBD
4	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 4,931,123,417.00	APBD
5	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 67,844,272.00	APBD

6	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 59,114,350.00	APBD
Jumlah			Rp. 18,023,591,484.00	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025
PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Dra. NINIK ASRUKIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650307 199703 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JOHAR GUNAWAN, S.Pd., S.E., M.M.

Jabatan : PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan **PIHAK KESATU**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 29 September 2025

PIHAK KESATU

PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK

JOHAR GUNAWAN, S.Pd., S.E., M.M.

Pembina
NIP. 197503192006041009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PLT. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya digitalisasi Layanan	1	Persentase digitalisasi layanan	43 Persentase
2	Meningkatnya implementasi persandian pada digitalisasi layanan	1	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan persandian	15.78 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik	1	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektor dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	100 Persen
4	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi	1	Nilai keterbukaan informasi publik	40 Nilai
		2	Persentase Pengaduan pelayanan Publik yang diselesaikan	97.10 Persen

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6,561,853,500.00	PAPBD
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp. 8,258,927,299.00	PAPBD
3	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 844,557,300.00	PAPBD
4	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 4,824,612,240.00	PAPBD
5	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 62,940,400.00	PAPBD

6	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 62,688,000.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 20,615,578,738.00	

Gresik, 29 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

PIHAK KESATU

PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK


JOHAR GUNAWAN, S.Pd., S.E., M.M.
Pemakta
NIP. 197503192006041009



Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Gresik

RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang mengacu pada Sasaran RKPD :

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi

Indikator : Indeks SPBE

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2025 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				164.263.013.835		66.820.884.659,38		20.815.578.739,00		2.768.040.520		3.531.004.145		4.469.944.170,00		8.380.690.189,99		19.148.679.025,10	119,28	92,89		85.970.563.683		52,34		
	2.16	Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika				153.431.274.835		64.747.267.368,38		20.488.950.339,00		2.748.354.520		3.499.377.145		4.464.441.869		8.312.575.673		19.024.748.007		92,85		83.772.948.375		54,88		
	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100	54.362.614.835	100	24.459.680.834,38	100	6.561.853.500,00	100	1.582.864.790	-	1.689.934.272	-	1.431.557.920	-	1.520.790.328	100	6.224.747.210	100	94,88	100	30.684.428.044	100,00	56,44		
	2.16.01.2.0.1	Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen/laporan perencanaan dan	Persen	100	270.363.370	100	104.042.175,00	100	10.180.000,00	100	5.350.000		1.610.000	-	1.150.000	-	2.070.000	100	10.180.000	100	100,00	200	114.222.175	200,00	42,25		
	2.16.01.2.0.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				185.556.600		80.715.250,00		5.980.000,00		4.600.000		460.000		-		920.000		5.960.000		100,00		86.695.250		46,72		
			Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan	Orang	150	51.492.000	150	56.154.400,00	-	-	-	-						-		-	-	0	150	56.154.400	100,00	109,05		
			Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	8	134.064.600	8	24.560.850	1	5.980.000,00	-	4.600.000		460.000	1	-	1	920.000	2	5.960.000	200	100,00	8	30.540.850	100,00	22,78		
	2.16.01.2.0.1.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKJIP, LPPD, SKIPP, Laporan Monev Kegiatan)	laporan	72	84.806.770	48	23.326.925	12	4.200.000,00	5	750.000		1.150.000	5	1.150.000	2	1.150.000	12	4.200.000	100	100,00	60	27.526.925	83,33	32,46		
Rata - rata capaian kinerja (%)																					100,00	109,00			200,00	42,25		
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	2.16.01.2.0.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan gaji dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan SKPD	Persen	100	27.891.844.018	100	16.407.970.987,38	100	5.554.973.900	100	1.362.526.505	-	1.454.782.965	-	1.207.518.630,00	-	1.275.941.748,00	100	5.300.769.879	100	95,42	100	21.708.740.876	100,00	77,83		
	2.16.01.2.0.2.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN DISKOMINFO	Tahun	2	7.443.496.200	2	7.477.138.397,00	-	-	-	-						-		-	0	0	2	7.477.138.397	100,00	100,45		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	136	20.379.577.534	100	8.910.272.900,38	32	5.553.138.000,00	32	1.362.030.505	32	1.454.782.996	32	1.207.518.630,00	32	1.274.601.849,00	32	5.298.933.979	100	95,42	132	14.209.206.879	97,06	69,72		
	2.16.01.2.0.2.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	laporan	2	3.420.000	2	4.366.000,00	-	-	-	-						-	-	-	0	0	2	4.366.000	100,00	127,66		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Perangkat gungah wab		Ket.		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	4	26,570,142	3	2,121,200.00	1	1,835,900.00	1	496,000					1,339,900	1	1,835,900	100	100.00	4	3,957,100	100.00	14.89						
2.18.01.2.02.07		Koordinasi Dan Penyelapan Laporan Keuangan Bulanan / Tribunalan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran perangkat daerah	laporan	6	8,970,000	6	9,459,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	6	9,459,000	100.00	105.45						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran perangkat daerah	laporan	4	29,808,142	2	4,613,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	4,613,500	50.00	15.48						
Rata - rata capaian kinerja (%)																					100.00	95.42			100.00	77.83					
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi					
2.16.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase fasilitasi ketersediaan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	8,597,000,000	100	2,298,044,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	100	2,298,044,550	100.00	26.73						
2.18.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian kerja lapangan	stel	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0.00	0						
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	3	230,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0.00	0.00						
2.18.01.2.05.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	825,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0.00	0.00						
2.18.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Cukai kepada masyarakat	kali	16	6,000,000,000	8	2,298,044,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	8	2,298,044,550	50.00	38.30						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	300	1,542,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0.00	0.00						
Rata - rata capaian kinerja (%)																					0	0			100.00	26.73					
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah					

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggun- g jawab	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	2.16.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase fasilitas ketersediaan operasional dan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	4,984,159,165	100	1,634,981,849	100	137,190,400	100	64,272,400	7	30,809,013	-	22,478,499	-	19,279,009	100	136,838,921	100	99.74	200	1,771,820,770	200.00	35.55		
	2.16.01.2.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				111,552,474		54,028,590		5,717,600		5,690,000		-						5,690,000		99.52		59,716,590		53.53		
		2021-2022 (renstra lama)	Jumlah Bahan Alat Listrik Jumlah Media Converter	Jenis	16	5,509,574	16	26,318,080	-	-	-	-							-	-	0	0	16	26,318,080	100.00	477.68		
		2023-2026 (review renstra)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	106,042,900	3	27,708,500	1	5,717,600.00	1	5,690,000		-					1	5,690,000	100	99.52	4	33,398,600	100.00	31.50		
	2.16.01.2.05.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan kantor				2,385,213,897		679,125,600		40,782,600		37,406,800		-				3,265,509		40,672,309		99.73		719,797,909		30.18		
			Jumlah Alat Pendingin Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Bahan Komputer Jumlah Komputer dan Peralatan Komputer	Jenis	92	239,942,537	92	496,654,600	-	-									-	-	0	0	92	496,654,600	100.00	206.99		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	24	2,145,271,360	13	182,471,000	1	40,782,600.00	1	37,406,800		-				3,265,509	1	40,672,309	100	99.73	14	223,143,309	58.33	10.40		
	2.16.01.2.05.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				115,284,320		48,392,400		4,981,700		4,896,000		-						4,896,000		95.28	0	53,288,400		46.22		
			Jumlah Bahan Dan Peralatan pembersih	Jenis	46	10,941,970	46	22,886,000	-	-									-	-	0	0	46	22,886,000	100.00	209.25		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	104,342,360	2	25,696,400	1	4,981,700.00	-	4,896,000		-			1		1	4,896,000	100	95.28	3	30,392,400	75.00	29.13		
	2.16.01.2.05.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				483,718,078		191,034,500		33,492,700		7,811,100		9,467,100		8,225,100		7,979,700		33,483,000		99.97	0	224,517,500		46.41		
			Jumlah Makanan dan Minuman	dos	550	38,463,078	550	84,356,000	-	-									-	-	0	0	550	84,356,000	100.00	219.32		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	445,255,000	2	106,678,500	1	33,492,700.00		7,811,100		9,467,100	1	8,225,100	-	7,979,700	1	33,483,000	100	99.97	3	140,161,500	75.00	31.48		
	2.16.01.2.05.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan				569,114,366		196,309,766		11,111,400		4,710,000		2,700,000		3,700,000		-		11,110,000		99.99	0	207,419,766		36.45		
			Jumlah Banner Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan Jumlah jasa Publikasi Liscapn	buah (24 banner, 830 amplop, 2020 kertas kop	2874	33,114,365	2874	111,076,708	-	-		-							-	-	0	0	2874	111,076,708	100.00	335.43		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	536,000,000	4	85,233,058	2	11,111,400.00		4,710,000		2,700,000	2	3,700,000	-	-	2	11,110,000	100	99.99	6	96,343,058	75.00	17.97				
2.16.01.2.06.08		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan				84,432,500		15,840,000		715,400		240,000		360,000						600,000		83.87	0	16,440,000		25.52				
			Jumlah Bahan Bacaan	Jenis	8	4,022,500	8	11,980,000	-	-		-							-	-	0	0	8	11,980,000	100.00	297.82				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	16	60,410,000	8	3,860,000	4	716,400.00		240,000		360,000					-		600,000	-	83.87	8	4,460,000	50.00	7.38			
2.16.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd				1,254,843,541		450,252,993		40,389,000		3,518,500		16,261,913		10,553,399		8,033,800		40,387,612	100.00	0	490,640,605		39.10					
			Jumlah Fasilitas Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jenis	4	26,000,000	4	178,695,694	-	-		-							-	-	0	0	4	178,695,694	100.00	687.29				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	1,226,843,541	4	271,557,299	2	40,389,000.00		3,518,500		16,261,913	2	10,553,399	-	8,033,800	2	40,387,612	100	100.00	6	311,944,911	75.00	25.39				
Rata - rata capaian kinerja (%)																					100.00	99.74			200.00	35.55				
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
2.16.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	4,218,907,813	100	84,725,000	100	-	100	-							-	100	-	100	0.00	200	84,725,000	200.00	2.01			
2.16.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2,550,000,000		-		-		-								-	0	0		-	0.00					
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8	2,550,000,000	-	-	-	-		-							-	0	0	0		-	0.00					
2.16.01.2.07.06		Pengadaan Mebel				843,607,813		84,725,000		-		-								-	0	0	84,725,000	0	10.04					
			Jumlah Mebel/Kursi	buah	20	6,037,000	20	70,200,000	-										-	0	0	20	70,200,000	100.00	1162.83					
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	75	837,870,813	1	14,525,000	-	-	-	-							-	0	0	1	14,525,000	1.33	1.73					
2.16.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				825,000,000		-		-		-								-	0	0		-	0.00					

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											K	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
			Jumlah ruangan kantor yang diberikan sekat antar meja/vertikal blind/kaca film/tak almari	paket	2		2												-		2													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	825,000,000	-	-										-	-	0	0		0,00											
Rata - rata capaian kinerja (%)																												100.00	0.00			200.00	2.01	
Predikat Kinerja																												Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase fasilitasi ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	5,451,597,887	100	2,930,791,080	100	763,789,200	100	130,298,485	-	174,357,545		178,159,681		200,501,170	100	683,316,881	100	89.46	200	3,614,107,961	200.00	66.29								
	2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, Listrik				1,650,842,860		701,891,490		191,301,200		32,253,165		30,642,065		34,424,201		36,826,530		134,147,961		70.12	0	836,039,451		50.84								
			Jumlah Operasional Bulanan	jenis	10	485,684,288	10	378,730,560	-			-						-	-	0	0	10	378,730,560	100.00	81.33									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	1,185,256,802	6	323,160,930	3	191,301,200	3	32,253,165	3	30,642,065	3	34,424,201	3	36,826,530	3	134,147,961	100	70.12	9	457,306,881	75.00	38.56								
	2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				518,254,997		190,899,300		16,610,000		5,555,000		5,560,000		5,600,000		-		10,735,000		99.55	0	213,034,300		41.14								
			Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jenis	6	61,545,943	6	118,924,750	-	-								-	-	0	0	6	118,924,750	100.00	193.23									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	457,709,054	6	77,974,550	3	16,610,000	-	5,555,000		5,560,000	3	5,600,000	-	-	3	16,735,000	100	99.55	9	94,709,550	75.00	20.69								
	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3,281,400,000		2,032,000,260		555,678,000		92,490,320		138,135,480		138,135,480		163,672,640		532,433,620		95.82	0	2,564,434,210		78.15								
			Jumlah Tenaga Administrasi Non Strata Satu, Jumlah Tenaga Administrasi Strata Satu, Jumlah Tenaga Keamanan, Jumlah Tenaga Kebersihan	orang	36	1,000,200,000	36	980,000,000	-	-								-	-	0	0	36	980,000,000	100.00	97.98									

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2025 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	78	2.281.200.000	38	1.052.000.290	19	555.678.000	19	92.490.320	19	138.135.480	19	138.135.480	19	163.672.640	19	532.433.920	100	95.82	57	1.584.434.210	75.00	89.46		
Rata - rata capaian kinerja (%)																					100.00	89.46			200.00	66.29		
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sedang		
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase fasilitasi ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	2.948.742.582	100	999.125.183	100	95.720.000	100	20.417.400	-	27.974.719	-	22.251.010	-	22.998.400	100	93.641.529	100	97.83	200	1.092.766.712	200.00	37.06		
	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perijinan Kendaraan Operasional Atau Lapangan				1.184.261.620		598.458.536		95.720.000		20.417.400		27.974.719		22.251.010		22.998.400		93.641.529		97.83	0	690.086.065		59.27		
			Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	kendaraan	12	65.393.620	12	248.225.700	-	-		-						-	-	0	0	12	248.225.700	100.00	379.59			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	kendaraan	28	1.098.868.000	14	348.230.838	7	95.720.000	7	20.417.400	7	27.974.719	7	22.251.010	7	22.998.400	7	93.641.529	100	97.83	21	441.872.366	75.00	40.21		
	2.16.01.2.09.08	Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya				1.784.480.962		402.668.647		-		-		-		-		-	-	0	0	0	402.668.647		22.57			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara	paket	1	109.900.000	1	256.362.325	-	-								-	-	0	0	1	256.362.325	100.00	233.30			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	4	1.674.580.962	1	146.276.322	-	-		-						-	-	0	0	1	146.276.322	25.00	8.74			
Rata - rata capaian kinerja (%)																					100.00	97.83			200.00	37.06		
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																					100.00	94.86			100.00	56.44		
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
	2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1. Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	persen	100	21.907.517.000	100	12.056.022.008	100%	8.258.927.299	100	691.620.525	-	985.681.882	100%	1.761.112.888	100%	3.804.400.540	100%	7.242.815.835	100	87.70	100%	19.298.837.843	1.00	88.09		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2. Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi	persen	100		100		100%		100%		0%		100%		100%		-	100		100%		100				
			3. Persentase permintaan data yang difasilitasi PPD	persen	100		100		100%		100%		0%		100%		100%		-	100		100%		100				
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	- Jumlah panggilan kedaruratan yg difasilitasi	buah	1,185	21,907,517,000	768	12,056,022,008	-	8,258,927,299	691,620,525	-	985,681,882	-	1,761,112,888	-	3,804,400,540	-	7,242,815,835	0	87.70	768	19,298,837,843	64.81	88.09			
			- Jumlah Konten penyelenggaraan pemerintahan yang Di Publikasikan melalui media	buah	5,209		6,017		-	-	-							-	-	0		6017		115.51				
			- Jumlah Media yang dimanfaatkan untuk publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan	buah	15		15		-	-	-							-	-	0		15		100.00				
			- Jumlah Pengaduan yang masuk dan difasilitasi	buah	683		480		-	-	-							-	-	0		480		70.28				
			- Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk	buah	2		7		-	-	-							-	-	0		7		350.00				
			- persentase Pengaduan yang ditanggapi tepat waktu	Persen	400%		100%		-	-	-				-		-		-	0		100%		25.00				
			- persentase permohonan informasi publik yang dicukupi	Persen	400%		100%		-	-	-				-		-		-	0		100%		25.00				
			- Jumlah informasi publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	buah	100		25		-	-	-				-		-		-	0		25		25.00				
			- Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan	buah	11,498		2,668		-	-	-				-		-		-	0		2668		23.20				
			- Jumlah lembaga komunikasi publik yang digunakan untuk penyebarluasan edukasi	lembaga	95		23		-	-	-				-		-		-	0		23		24.21				
			1. Persentase OPD yang menindaklanjuti pengaduan tepat waktu	Persen	285,21%		100.0%		95.6%		95.6%		-		95,06%		100%		100%	-	104,60		2,000		0			

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			2. Persentase panggilan kedaruratan yg ditindaklanjuti	Persen	300%		100%		100%		100%		%		100%		100%		100%		-	100.00		2		66.67		
			3. Jumlah OPD yang menyediakan Daftar Informasi dan dokumentasi publik	lembaga	27		12		9		1		4		3		3		11		-	122.22		23		85.19		
			4. Jumlah konten informasi pemerintah yang dipublikasikan	buah	6,030		2005		2800		736		695		1,101		2,140		4,675		-	166.96		6680		110.76		
2.16.02.2.01.02		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rapat koordinasi fasilitasi PPID	kali	9	537,014,400	9	266,002,185	-	-									-		0	0	9	266,002,185	100.00	49.53		
			Jumlah rapat koordinasi fasilitasi pengaduan di aplikasi lapor.go.id	kali	15	178,131,000	15	209,708,110	-	-									-		0	0	15	209,708,110	100.00	117.73		
			Jumlah pelatihan penggunaan aplikasi lapor.go.id	kali	3		3		-	-									-		0	0	3		100.00	0		
			Jumlah Sosialisasi terkait informasi publik oleh PPID lingkup OPD	kali	3		3		-	-									-		0	0	3		100.00	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	2	358,883,400	1	58,294,075		-									-		0	0	1	58,294,075	50.00	15.69		
2.16.02.2.01.19		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	rekomendasi	48 (24 rekomendasi pengaduan dan 24 rekomendasi call centre)	2,337,433,000			24 (12 rekomendasi pengaduan dan 12 rekomendasi call centre)	574,040,000	3	61,900,000	5	141,870,000	6	145,831,352	6	219,734,000	20	569,435,352	0.13	99.20	20	569,435,352	0	24.36		
2.16.02.2.01.04		Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1,269,546,137		1,121,211,530		-									-		0	0		1,121,211,530		88.32		
			Jumlah pemeliharaan website gresikkab.go.id	paket	2	620,275,437	2	826,883,909											-		0			826,883,909		133.31		
			Jumlah pemeliharaan website SiDesa	paket	1		1		-	-									-		0	0	1		100.00	0		
			Jumlah pemeliharaan website skipip	paket	1		1		-	-									-		0	0	1		100.00	0		
			Jumlah pemeliharaan website PPID	kali	1		1		-	-									-		0	0	1		100.00	0		
			Jumlah lisensi fliping	Dokumen	1		1		-	-									-		0	0	1		100.00	0		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Pengungia wab	Ket
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			Jumlah rapat koordinasi update data penyelenggaraan pemerintahan dengan OPD	kali	7		7		-								-		-	0	0	7		100.00	0			
			jumlah koordinasi kegiatan OPD yang dipublikasikan	kali	51		51		-								-		-	0	0	51		100.00	0			
			Jumlah lisensi cpanel tahunan	paket	3		3		-								-		-	0	0	3		100.00	0			
			jumlah web hosting OPD yang di kelola	paket	45		45		-								-		-	0	0	45		100.00	0			
			Jumlah Pembelian PC untuk desain gratis	paket	2		2		-								-		-	0	0	2		100.00	0			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	2	649,270,700	1	294,327,621									-		-	0	0	1	294,327,621	50.00	45.33			
2.16.02.2.01.023		Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	1,124	638,000,000			562	21,695,500	360	12,400,000	498	-	364	1,265,000	354	7,021,500	1,586	20,886,500	262	95.35	1586	20,886,500	141.10	3.24		
2.16.02.2.01.05		Pengelolaan Media Komunikasi Publik				2,754,273,763		2,914,670,958		-		-		-			-		-		0		2,914,670,958		105.82			
			Pembuatan Perda Radio suara Gresik	perda	1	1,352,661,963	1	1,702,886,228										-		-	0	0	1	1,702,886,228	100.00	125.69		
			Jumlah Koordinasi dengan Balmon dan pusat terkait perijinan Radio	kali	3		3		-									-		-	0	0	3		100.00	0		
			Jumlah Iuran tahunan frekuensi radio	lisensi	1		1		-									-		-	0	0	1		100.00	0		
			Jumlah sewa internet (Mbps)	paket	30		30		-									-		-	0	0	30		100.00	0		
			Jumlah Tenaga Penyiar yang di rekrut	orang	15		15		-									-		-	0	0	15		100.00	0		
			Jumlah Tenaga teknis radio	orang	1		1		-									-		-	0	0	1		100.00	0		
			Jumlah Tenaga konten kreatif untuk sosial media	orang	2		2		-									-		-	0	0	2		100.00	0		
			Jumlah Tenaga konten kreatif untuk video	orang	1		1		-									-		-	0	0	1		100.00	0		
			jumlah lisensi lagu yang dibeli	buah	950		950		-									-		-	0	0	950		100.00	0		
			Jumlah lisensi radiobost	paket	1		1		-									-		-	0	0	1		100.00	0		
			Jumlah lisensi Adobe Audition	paket	2		2		-									-		-	0	0	2		100.00	0		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			Jumlah pemeliharaan pemancar radio FM	paket	2		2		-								-	-	0	0	2		-	100,00	0			
			Jumlah Pemeliharaan peralatan streaming	paket	2		2		-								-	-	0	0	2		-	100,00	0			
			Jumlah reportase yang dilakukan	kali	372		372		-								-	-	0	0	372		-	100,00	0			
			Jumlah domain dan hosting suaragesik.id	paket	2		2		-								-	-	0	0	2		-	100,00	0			
			Jumlah penayangan di media televisi	kali	2		2		-								-	-	0	0	2		-	100,00	0			
			Jumlah rapat monitoring dan evaluasi crew radio	kali	92		92		-								-	-	0	0	92		-	100,00	0			
			Jumlah rapat monitoring dan evaluasi media	kali	12		12		-								-	-	0	0	12		-	100,00	0			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	2	1,401,611,800	1	1,211,784,730	-								-	-	0	0	1	1,211,784,730	50,00	86,46				
2.16.02.2.01.21		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/uknis	media	32	1,660,000,000			16	820,526,300	16	66,637,000	16	110,630,360	16	403,715,240	16	237,833,000	16	819,115,580	100	89,83	16	819,115,580		44,04		
2.16.02.2.01.06		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	2	533,920,000	1	66,739,179	-								-	-	0	0	0	66,739,179	0	12,50				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	2	533,920,000	1	66,739,179	1								-	-	-	0	1	66,739,179	50,00	12,50				
2.16.02.2.01.17		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	permohonan	2	595,000,000			1	25,965,500		10,596,719		5,264,432	24	3,870,076	24	4,146,030	48	23,901,257	4,800	82,05	48	23,901,257	2400,00	4,02		
2.16.02.2.01.07		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media			1,005,256,000		5,183,168,081	-								-	-	0	0	0	5,183,168,081	0	515,61				
			Jumlah Layanan Hubungan Media	layanan	2	1,005,256,000	1	5,183,168,081	-								-	-	0	0	1	5,183,168,081	50,00	515,61				
2.16.02.2.01.0014		Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi di warn pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	laporan (notes jumlah media di pwt+kwg)	2	1,278,638,000			1	6,762,330,499	1	539,374,806	1	720,102,100	1	1,189,181,220	1	3,323,224,510	1	5,781,882,636	100	85,25	1	5,781,882,636	0	451,84		
2.16.02.2.01.09		Manajemen Komunikasi Krisis				5,800,410,400		2,276,624,600	-										-		0			2,276,624,600		39,25		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			Jumlah Tenaga Call Taker dan dispatch yang di rekrut	orang	21	4,322,970,400	21	1,157,746,800	-									-	-	0	0	21	1,157,746,800	100.00	26.78			
			Jumlah tenaga sound dan multi media center	orang	2		2	-										-	-	0	0	2	-	100.00	0			
			Jumlah sewa aplikasi kedaruratan call 112	tahun	2		2	-										-	-	0	0	2	-	100.00	0			
			Jumlah sewa Backup internet (Mbps)	tahun	50		50	-										-	-	0	0	50	-	100.00	0			
			Jumlah Pembangunan media Centre	unit	1		-											-	-	0	0	0	-	0.00	0			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Publik	dokumen	2	1,477,440,000	1	1,119,078,000										-	-	0	0	1	1,119,078,000	50.00	75.74			
2.16.02.0.01.10		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				440,514,100		63,360,500	-									-	-	0	0	0	63,360,500	0	14.38			
			Jumlah Jatim Kominfo Festival (JKF) yang diikuti oleh KIM	kali	1	31,719,000	1	54,360,500	-									-	-	0	0	1	54,360,500	100.00	171.38			
			Jumlah pelatihan untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	kali	4		5	-										-	-	0	0	5	-	125.00	0			
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	260	406,795,100	130	9,000,000	-									-	-	0	0	130	9,000,000	50.00	2.20			
2.16.02.2.01.0024		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bintek/pelatihan	Orang	260	555,000,000			-									-	-	0	0	0	-	0.00	0.00			
2.16.02.0.01.12		penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				596,603,200		54,973,000	-									-	-	0	0	0	54,973,000	0	9.21			
			Jumlah rekomendasi Branding Kabupaten Gresik	laporan	5	286,603,200	-											-	-	0	-		-	0.00				
			Jumlah Kebijakan Branding Kabupaten Gresik	laporan	2		-											-	-	0	-	0	-	0.00				
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	2	330,000,000	-	54,973,000	1									-	-	-	-	0	-	0.00				
2.16.02.2.01.0015		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		Komunitas	4	540,000,000			2	34,367,500	2	410,000	7,695,000	2	7,250,000	2	12,439,500	2	27,794,500	100	80.87	2	27,794,500	50.00	5.15			

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2025 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	2.16.02.0.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,164,907,000		109,071,975			-							-	-	0	0	0		109,071,975	0	9.36			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	unit	12	1,164,907,000	3	109,071,975			-	-						-	-	0	0	3		109,071,975	25.00	9.36			
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Tinggi					Sangat Tinggi	Tinggi		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																				100.00	87.70					1.00	88.09		
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Tinggi					Sangat Rendah	Tinggi		
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	1. Presentase OPD yang Memanfaatkan Ruang Server	Persen	150%	77,161,143,000	156%	28,231,594,526	100%	5,669,169,540	100%	473,869,205	-	824,160,991	100%	1,271,770,961	100%	2,987,384,805	100%	5,557,185,962	100	98.02	2.56	33,788,780,488	170.67	43.79				
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2. Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Aset TIK	Persen	252%		109%		75%		30%		-		61%		86.96% (40/46)		87%		-	116		1.96		77.76				
		3. Persentase OPD yang Menggunakan Sistem Penghubung Layanan	Persen	252%		103.08%		75%		26.08%		-		27.08%		64.58%		64.58%		-	86.11		1.68		68.53				
		4. Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Data	Persen	252%		78.08%		50%		0%		50%		75%		75%		75%		-	150		1.53		60.75				
		1.Prosentase Dokumen Kebijakan yang dievaluasi	Persen	600%		300%		100%		0		0		100%		100%		100%		-	100		4.00		66.67				
		2. Persentase indikator SPBE yang dievaluasi	Persen	600%		300%		100%		0		0		-		-		-		-	-		3.00		50.00				
		3. Persentase OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	Persen	525%		264%		100%		-		-		-		100%		100%		-	100		3.64		69.33				
		4. Persentase aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi	Persen	272%		106% (16/15)		73% (11/15)		0.28		-		53%		73% (11/15)		73% (11/15)		-	73		0.53		19.49				
		5. Persentase OPD yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE	Persen	210%		148%		100%		0.7		-		0.7		100%		100%		-	100		2.45		116.67				

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	2.16.03.2.01.03	Pengelolaan Nama Domain Yng Telah Di Tetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /kota	- Kapasitas Bandwith Internet untuk perkantoran pemerintahan	Gb	9.60	23,230,911,740	2	20,389,575,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	2.10	20,389,575,758	21.88	87.77			
			- Jumlah keluhan, kecamatan dan OPD yang terlayani jaringan intranet	OPD	176		176		-									-		0		176.00		100.00				
			- jumlah pemeliharaan jaringan intra	paket	2		2		-									-		0		2.00		100.00				
			- jumlah pemeliharaan jaringan Fiber Optik	paket	2		2		-									-		0		2.00		100.00				
			- jumlah pemeliharaan jalur CCTV	paket	2		2		-									-		0		2.00		100.00				
			2. Jumlah OPD yang dibina untuk menerapkan manajemen Aset TIK	OPD	50		15		15		5		-		-		46		46.00		306.67		61.00		122.00			
			1. Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah	persen	276% (241735 D40 jam)		90%		92%		30%		-		-		93.85%		93.85%		102.01		1.84		0.45			
	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				23,230,911,740		20,389,575,758		-		-								-		0	0	20,389,575,758		87.77		
			Kapasitas Bandwith Internet untuk perkantoran pemerintahan	GBps	1.50	8,613,204,511	1.50	8,188,320,773	-	-									-	0	0	1.50	8,188,320,773	100.00	92.91			
			Jumlah Kelurahan,Kecamatan Dan OPD Yang Terlayani Jaringan Intranet	lembaga	176		176		-										-	0	0	176		100.00	0			
			Jumlah metro untuk mendukung jaringan intra pemerintah	unit	88		52		-										-	0	0	52		59.09	0			
			Jumlah tenaga ahli jaringan yang di rekrut	orang	2		2		-										-	0	0	2		100.00	0			
			Jumlah server clustering yang diadakan	unit	4		4		-										-	0	0	4		100.00	0			
			Jumlah iuran As number (tahunan)	tahun	2		2		-										-	0	0	2		100.00	0			
			jumlah pemeliharaan jaringan intra	paket	2		2		-										-	0	0	2		100.00	0			
			jumlah pemeliharaan jaringan Fiber Optik	paket	2		2		-										-	0	0	2		100.00	0			
			jumlah pemeliharaan jalur CCTV	paket	2		2		-										-	0	0	2		100.00	0			

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			rapat koordinasi terkait penggunaan jaringan intra	kali	5		5		-		-							-		-	0	0	5		-	100.00	0	
			jumlah perjalanan dinas pengecekan troubleshooting jaringan	kali	36		36		-		-							-		-	0	0	36		-	100.00	0	
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	2	14,417,707,229	1	12,201,254,985			1	-						1	-	-	0	0	2	12,201,254,985	100.00	84.63		
Rata - rata capaian kinerja (%)																					204.34	0.00			77.76	87.77		
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Tinggi		
2.16.03.2.02		Pengelolaan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	- Jumlah server backup yang di adakan	unit	3	53,930,231,260	1	7,842,018,768	-	5,669,169,540	-	473,869,205	-	824,160,991		1,271,770,961.00		2,967,384,804.99	-	5,557,185,662	0	98.02	1	13,399,204,730	33.33	24.85		
			- Jumlah UPS yang diadakan	unit	2		1		-		-		-			-		-	-	-	0		1		50.00			
			- Jumlah tenaga ahli programer yang di rekrut	orang	2		2		-		-		-			-		-	-	-	0		2		100.00			
			- Kapasitas server clustering	GB	1,220		986		-		-		-			-		-	-	-	0		986		80.85			
			- Kapasitas server backup data	Tb	24		44		-		-		-			-		-	-	-	0		44		163.33			
			- Kapasitas Backup Listnk (UPS)	kVa	12		15		-		-		-			-		-	-	-	0		15		125.00			
			- Manajemen Data Warehouse/Big Data	paket	1		-		-		-		-			-		-	-	-	0		0		0.00			
			- Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	tingkat	13		4		-		-		-			-		-	-	-	0		4		30.77			
			- Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	tingkat	15		3		-		-		-			-		-	-	-	0		3		20.00			
			- Jumlah OPD yang mengakses data dari Sistem Penghubung Layanan	lembaga	26		5		-		-		-			-		-	-	-	0		5		19.23			
			- Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	tingkat	15		5		-		-		-			-		-	-	-	0		5		33.33			
			- Jumlah Kebijakan SPBE yang dievaluasi	pedoman	4		4		-		-		-			-		-	-	-	0		4		100.00			
			- Jumlah Indikator SPBE yang dievaluasi	indikator	94		94		-		-		-			-		-	-	-	0		94		100.00			
			- Jumlah OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	lembaga	60		56		-		-		-			-		-	-	-	0		56		93.33			

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penang gungjab	Ket	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
			- Jumlah aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi	aplikasi	2		2		-		-		-		-		-		-		0		2		100.00				
			- Jumlah Opd yang menerapkan manajemen Layanan SPBE	lembaga	6		6		-		-		-		-		-		-		0		6		100.00				
			1. Jumlah VPS yang dikelola	buah	585		180		212		40		-		236		236		236.00		-	111.32		416		71.11			
			2. Jumlah API yang dikelola	buah	66		18		36		10		-		32		7		49.00		-	136.11		67		101.52			
			1. Jumlah pedoman pelaksanaan SPBE yang disusun dan dievaluasi	pedoman	8		4		4		-		-		-		2		2.00		-	50.00		6		75.00			
			2. Jumlah Dokumen Perencanaan SPBE yang dievaluasi	dokumen	8		4		2		-		-		-		2		2.00		-	100.00		6		75.00			
			3. Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle)	aplikasi	39		13		11		11		-		11		11		11		-	100.00		24		61.54			
			4. Jumlah Indikator Evaluasi SPBE yang dipenuhi: Data Dukung dan Narasumber	indikator	188		47		47		47		-		47		47		47		-	100.00		94		50.00			
			- Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	tingkat	16		3		-		-		-		-		-		-		-	0		3		16.67			
			- Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	tingkat	14		2		-		-		-		-		-		-		-	0		2		14.29			
			5. Jumlah layanan yang dikelola melalui service desk	Layanan	99				31		-		-		31		27		56.00		-	107.10		50		50.59			
	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota				654,625,000		591,172,653		-		-							-		-	0	0	591,172,653		61.93			
			1. Jumlah Kebijakan SPBE yang dievaluasi	pedoman	3	359,525,000	3	348,343,588	-										-		-	0	0	3	348,343,588	100.00	96.69		
			2. Jumlah Kebijakan SPBE yang disusun	pedoman	1		1		-										-		-	0	0	1		100.00	0		
			3. Jumlah SOP SPBE yang disusun	pedoman	4		4		-										-		-	0	0	4		100.00	0		
			4. Jumlah Rapat Koordinasi SPBE	kali	2		2		-										-		-	0	0	2		100.00	0		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggunj wab	Ket.	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataleaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	595,000,000	4	242,829,095			-	-							-	-	0	0	4	242,829,095	100.00	40.81			
	2.18.03.2.02.015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	8	1,500,000,000			4	21,750,450		5,440,000		4,631,500	-	7,415,000	4	3,838,243	4	21,424,743	100	98.50	4	21,424,743	50.00	1.43			
	2.18.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				527,734,000		205,580,777	-	-									-		0	0		205,580,777		38.99			
			1. Jumlah FGD Penetapan Peta Rencana SPBE	kali	12	329,404,000	12	164,817,750	-	-									-	-	0	0	12	164,817,750	100.00	50.04			
			2. Jumlah CPD yang difasilitasi dalam Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE	opd	38		78		-										-	-	0	0	78		211.11	0			
			Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	dokumen	8	198,330,000	4	40,763,027			-	-							-	-	0	0	4	40,763,027	50.00	20.55			
	2.18.03.2.02.18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Dokumen	2	350,000,000			1	110,644,000			-		1	6,384,000	1	103,233,199	2	109,627,199	200	99.08	2	109,627,199	100.00	31.32			
	2.18.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah				9,280,068,241		753,929,325		-		-								-		0	0		753,929,325		8.12		
			Jumlah perencanaan Pembangunan media centre	paket	1	3,614,204,447	1	545,784,825		-										-	-	0	0	1	545,784,825	100.00	15.10		
			Jumlah Pembangunan Ruang Server Baru	paket	1		-		-											-	-	0	0	0		0.00	0		
			Jumlah Pendeteksi suhu ruangan	unit	1		1		-											-	-	0	0	1		100.00	0		
			Jumlah AC central	unit	1		1		-											-	-	0	0	1		100.00	0		
			Jumlah server clustering yang di adakan	unit	2		2		-											-	-	0	0	2		100.00	0		
			Jumlah server backup yang di adakan	unit	1		1		-											-	-	0	0	1		100.00	0		
			Jumlah UPS yang diadakan	unit	1		1		-											-	-	0	0	1		100.00	0		
			Jumlah listrik premium yang diadakan	unit	1		1		-											-	-	0	0	1		100.00	0		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			Jumlah rapat koordinasi terkait pemanfaatan ruang server oleh OPO	kali	10		10											-	-	0	0	10	-	100.00	0			
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	unit	2	5,665,863,794	2	208,144,500		-	-							-	-	0	0	2	208,144,500	100.00	3.67			
	2.16.03.2.02.13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	200	13,277,651,788			100	36,966,700	100	-	19,369,000	100	12,366,000	100	5,003,000	100	36,738,000	100	99.38	100	36,738,000	50.00	0.26			
	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik				1,509,093,380		4,744,170,779	-	-								-	-	0	0		4,744,170,779		314.37			
			Jumlah Lisensi Office 365 yang disewa;	lisensi	3	774,703,380	1	999,572,244	-	-								-	-	0	0	1	999,572,244	33.33	129.03			
			Jumlah Lisensi Zoom yang disewa;	lisensi	10		9		-	-								-	-	0	0	9	-	90.00	0			
			Jumlah Aplikasi Greekpedia yang disewa;	bulan	23		23		-	-								-	-	0	0	23	-	100.00	0			
			Jumlah Tenaga Ahli Programmer yang direkrut;	orang	2		2		-	-								-	-	0	0	2	-	100.00	0			
			Jumlah Portal Layanan Administrasi Pemerintahan yang dibangun/Sewa Aplikasi One Handling System	paket	1		1		-	-								-	-	0	0	1	-	100.00	0			
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	aplikasi	19	734,390,000	11	3,744,598,535		-	-							7	-	0	0	18	3,744,598,535	94.74	509.69			
	2.16.03.2.02.020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	22	813,922,000			11	537,993,100	11	27,463,144	56,482,784	11	42,887,908	11	410,209,016	11	537,052,852	100	99.83	11	537,052,852	50.00	65.98			
	2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah				567,167,139		406,000,633		-	-								-	-	0	0		406,000,633		71.58		
			Jumlah tenaga ahli programmer yang di rekrut	orang	2	160,635,162	2	160,705,500	-	-									-	-	0	0	2	160,705,500	100.00	100.11		
			Jumlah rapat koordinasi tentang layanan penghubung	kali	4		4		-	-									-	-	0	0	4	-	100.00	0		
			Jumlah rapat monitoring database OPD	kali	3		3		-	-									-	-	0	0	3	-	100.00	0		
			Jumlah sosialisasi arsitektur data dan informasi	kali	2		2		-	-									-	-	0	0	2	-	100.00	0		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			Jumlah perjalanan dinas terkait layanan penghubung di OPD	kali	20		20		-									-		-	0	0	20		100,00	0		
			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	24	406.631,977	14	245,295,133	10		-							-		-	-	0	14	245,295,133	58.33	60.32		
	2.16.03.2.02.021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	60	691,631,864			30	20,528,000	30	-	3,780,000	30	920,000	30	15,828,793	30	20,528,793	100	100,00	30	20,528,793	50,00	2.97			
	2.16.03.2.02.09	Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas Dan Kota Cerdas				1,215,750,000		773,304,144		-	-							-			0		773,304,144		63.61			
			1. FGD Penerapan Smart City	kali	14	388,250,000	14	384,270,151	-	-								-		-	0	14	384,270,151	100,00	98.49			
			2. Jumlah Rapat Evaluasi Smart City	kali	5		5		-									-		-	0	5		100,00	0			
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	dokumen	24	817,500,000	6	388,033,993	-	-								-		-	0	6	388,033,993	25,00	47.59			
	2.16.03.2.02.023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Perangkat daerah	55	1,042,301,000			28	120,046,800	28	9,761,790	11,415,000	28	10,564,000	28	73,990,000	28	105,730,790	100	88.07	28	105,730,790	50,00	10.14			
	2.16.03.2.02.10	Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah				775,200,500		318,990,457	-	-								-			0	0	318,990,457	0	41.15			
			Rapat OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE (4 x 48 CPD)	kali	48	375,200,500	48	217,562,225	-		-							-		-		0	217,562,225		57.99			
			Jasa konsultansi Pengelolaan Layanan SPBE	paket	1		1		-		-							-		-	0	1		100,00	0			
			Pembangunan Single sign on	paket	1		1		-		-							-		-	0	1		100,00	0			
			Jumlah Pelatihan Manajemen jaringan CPD	kali	2		2		-		-							-		-	0	2		100,00	0			
			Jumlah Pelatihan Manajemen data	kali	2		2		-		-							-		-	0	2		100,00	0			
			Jumlah Pelatihan Sistem Penghubung layanan	kali	2		2		-		-							-		-	0	2		100,00	0			

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	2	400.000,000	1	101,428,232			-	-						-	-	0	0	1	101,428,232	50,00	25,36					
	2.16.03.2.02.019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	6	750.000,000			3	54,122,950	1	4,772,150		2,645,000	2	38,878,890	-	6,232,816	3	52,528,456	100	97,05	3	52,528,456	50,00	7,00				
	2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE				206,032,000		48,870,000			-	-								-		0	0	48,870,000		23,49				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	8	206,032,000	4	48,870,000			-	-							-	-	0	0	4	48,870,000	50,00	23,49				
	2.16.03.2.02.024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	perangkat daerah	92	20,466,854,348			46	4,767,116,540	46	426,432,121		725,827,707	46	1,152,345,363	46	2,368,949,938	46	4,673,555,129	100	98,04	46	4,673,555,129	50,00	22,63				
Rata - rata capaian kinerja (%)																					112,08	98,02			67,72	24,85				
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA																					91,67	98,02			77,54	43,79				
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah				
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Komunikasi dan Informatika						153,431,274,835		64,747,297,368		20,489,950,339		2,748,354,520		3,499,377,145		4,464,441,669		8,312,575,673		19,024,749,007			83,772,046,375							
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																					97,22	93,53			59,51	62,78				
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah				
	2.20	Urusan Pemerintah Bidang Statistik				4,015,629,000		1,154,507,525		62,940,400		18,726,000		26,590,000		2,568,501		12,562,017		62,446,518		99,22		1,216,954,043		30,30				
	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun	persen	133%	4,015,629,000	73% (22/30)	1,154,507,525	33%	62,940,400	0,10	18,726,000	-	26,590,000	33%	2,568,501	53% (16/30)	12,562,017	53%	62,446,518	100,61	99,22	90%	1,216,954,043	67,67	30,30				
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	- Jumlah Data Sektoral lingkup OPD yang disusun	data	6	4,015,629,000	3	1,154,507,525		62,940,400		18,726,000		26,590,000		2,568,501		12,562,017	-	62,446,518	0	99,22	3,00	1,216,954,043	50,00	30,30				

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
			- Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Satu Data	kali	12		3		-									-		-	0		3.00		25.00					
			1. Jumlah OPD yang menyusun atau mengolah data secara terpilah gender	OPD	18		12		5		5		-	-	-		4		9.00		180		21.00		116.67					
			4. Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	tingkat	18		3		-									-		-	0		3.00		16.67					
			2.Jumlah OPD yang mengumpulkan data statistik sektoral	buah	135		35		45		45		-	-	48		48		48.00		102		81.00		60.00					
			3. Jumlah Data Induk yang dikelola	buah	12		2		4		2		-	-	1		1		4.00		100		6.00		50.00					
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Di Sminasi Data Statistik Sektoral				1,451,680,000	365,465,525		-									-		-	0	0	0.00	365,465,525	0	25.18				
			Jumlah Cetakan ke dua Buku DDA / KDA yang diterbitkan BPS Kabupaten Gresik	buah	100	807,853,000	-	131,908,772	-		-									-	0			131,908,772	16.33					
			Jumlah rapat pembuatan Kebijakan satu data	kali	6		-		-		-								-		-	0	0	0.00	-	0.00	0			
			Jumlah Sosialisasi tentang data sektoral OPD	kali	1		1		-		-								-		-	0	0	1	-	100.00	0			
			Jumlah Sosialisasi tentang Wali data	kali	2		2		-		-								-		-	0	0	2	-	100.00	0			
			Jumlah rapat koordinasi data statistik sektoral	kali	4		4		-		-								-		-	0	0	4	-	100.00	0			
			Jumlah penyusunan data inflasi Kabupaten Gresik	data	1		1		-		-								-		-	0	0	1	-	100.00	0			
			Jumlah penyusunan data analisa bencana Balongpanggang Benjeng Cerme	data	1		1		-		-								-		-	0	0	1	-	100.00	0			
			Jumlah penyusunan data NTN dan NTP	data	1		1		-		-								-		-	0	0	1	-	100.00	0			
			Jumlah tenaga ahli analis statistik yang di rekrut	orang	1		1		-		-								-		-	0	0	1	-	100.00	0			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	2	643,827,000	2	233,586,753			-								-		-	0	0	2	233,586,753	100.00	36.28			

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung jawab		Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	2	815,000,000			1	43,355,400		15,726,000	1	20,944,000			6,318,000	1	42,988,000	100	99.15	1	42,988,000	50.00	5.27				
	2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				325,000,000		25,591,500		-		-						-	-	0		0		0	0.00				
			Jumlah CPD yang di beri pelatihan tentang data statistik sektoral	lembaga	48		-	-		-	-	-						-	-	0		0		0.00					
			Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	orang	74	325,000,000	-	25,591,500				-						-	-	0		0		0.00					
	2.20.02.2.01.007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	45	485,000,000			45	19,585,000		3,000,000		7,646,000	50	2,568,501	50	6,244,017	50	19,458,518	111	99.35	50	19,458,518	111.11	4.01			
	2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur				379,500,000		763,420,500		-		-						-	-	0	0	0		763,420,500	0	201.16			
			Jumlah Infrastruktur Statistik	unit	4	379,500,000	2	763,420,500				-						-	-	0	0	2		763,420,500	50.00				
	2.20.02.2.01.008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang nilis tepat waktu	persen		559,649,000		-		-		-						-	-	0	0	0		0	0.00				
Rata - rata capaian kinerja (%)																				127.41	99.22			53.06	30.30				
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																				160.61	99.22			67.67	30.30				
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah				
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Statistik						4,015,829,000		1,154,507,525		62,940,400		18,725,000		28,590,000		2,568,501		12,562,017		62,446,518				1,216,954,043					
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN STATISTIK																				160.61	99.22			67.67	30.30				
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah				
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				600%	6,815,910,000	300%	919,079,765	100%	62,688,000	-	960,000		3,037,000		2,934,000		55,552,500	0	62,483,500	100	99.67	3	981,563,265		14.40			
2.21.02.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penanganan Serangan Cyber		persen	600%	6,815,910,000	300%	919,079,765	100%	62,688,000	100%	960,000	-	3,037,000	100%	2,934,000	100%	55,552,500	100%	62,483,500	100.00	99.67	4.00	981,563,265	66.67	14.40			

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Keamanan Informasi	persen	502%	6,915,910,000	202%	919,079,765	-	62,688,000		960,000		3,037,000	-	2,934,000	-	55,552,500	-	62,483,500	0	99.67	2.02	961,563,265	40.24	14.40			
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1. Jumlah OPD yang menerapkan manajemen keamanan informasi	lembaga	27		6		9		3		-		3		3		9.00	-	100.00	0	15.00	-	55.56	0			
	2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,175,391,894	155,988,282		3,855,000	-	960,000		2,002,000		795,000			-	3,757,000		87.48	0	159,745,282		13.59				
			Jumlah OPD yang diberikan pelatihan tentang keamanan informasi	lembaga	58	105,326,000	58	137,943,000										-	-	0	0	58	137,943,000	100.00	133.50				
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	laporan	4	1,072,065,894	2	18,045,282	1	3,855,000	-	960,000		2,002,000	-	795,000	1	-	1	3,757,000	100	87.48	3	21,802,282	75.00	2.03			
	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik				5,640,518,106	763,061,483		58,833,000	-			1,035,000	0	2,139,000	0	55,552,500	-	58,726,500	0	99.82	0	821,817,983	0	14.57				
			Jumlah Firewall yang digunakan untuk keamanan jaringan	Unit	1	286,477,000	1	446,281,753	0	-	0							-	-	0	0	1	446,281,753	100.00	155.76				
			Jumlah Pengamanan yang digunakan untuk mengamankan transmisi data antar dua sistem yang berbeda	paket	2		2		0		0							-	-	0	0	2	-	100.00	0				
			Jumlah user Antivirus	user	75		75		0		0							-	-	0	0	75	-	100.00	0				
			Jumlah tenaga ahli untuk penanganan insiden keamanan yang di rekrut	orang	3		3		0		0							-	-	0	0	3	-	100.00	0				
			Jumlah maintenance email gresikkab.go.id	paket	1		1		0		0							-	-	0	0	1	-	100.00	0				
			Jumlah Sosialisasi arsitektur keamanan informasi	kali	2		2		0		0							-	-	0	0	2	-	100.00	0				
			Jumlah Sosialisasi Digital Signature	kali	2		2		0		0							-	-	0	0	2	-	100.00	0				
			Jumlah pelatihan penggunaan Digital Signature	kali	5		5		0		0							-	-	0	0	5	-	100.00	0				
			Jumlah evaluasi penggunaan Digital Signature	kali	2		2		0		0							-	-	0	0	2	-	100.00	0				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (2021-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit, smpd Panan gunung awab	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
			Jumlah Perjalanan Dinas terkait penanganan keamanan informasi	kal	37		37		0		0							-		-	0	0	37		-	100,00	0	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	4	5.354.041.105	2	316.809.730	1	58.833.000	-	-	1.035.000	2.139.000	1	55.552.500	1	58.726.500	100	99,82	3	375.536.230	75,00	7,91				
Rata - rata capaian kinerja (%)																		100,00	99,87			47,90	14,40					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENYELENGGARAAN PERBANDUAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																		100,00	99,87			66,67	14,40					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah					
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Persandian						6.815.910.000		919.079.765		62.888.000	-	960.000	-	3.837.000	-	2.934.000	-	55.552.500	-	62.483.500	100	99,87	0	981.563.265				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN PERSANDIAN																		100,00	99,87			66,67	14,40					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	
sangat tinggi	91% ≤ 100%
tinggi	76% ≤ 90%
sedang	66% ≤ 75%
rendah	51% ≤ 65%
sangat rendah	≤ 50%

Keterangan	
Nama Urusan	
Nama Instansi	
Capaian Kinerja Per Program	
Total Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program	

Disusun

Gresik, 19 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



Joko Gunawan, S.Pd.,S.E., M.M

Pembina (P/1)

NIP. 52700012 200504 1 009

Disetujui

Gresik, Januari 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan

Edy Hadisriwoyo,S.H.,M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680503 199703 1011



**LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN
2024 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN 2024 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

Nomor : 700/2309.8/437.72/2025

Tanggal : 14 Oktober 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/2146/437.72/2025 tanggal 26 September 2025.

B. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi

birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

C. Tujuan

Evaluasi atas implementasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi AKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen

Rencana Kinerja Tahun 2025, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator

B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

F. Gambaran Umum

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang

selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah :

"Dinas Komunikasi dan Informatika membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian". Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Jabatan Fungsional .
3. Bidang Statistik dan Informasi publik, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
4. Bidang Teknologi dan Informatika, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
5. Bidang SPBE, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

6. UPT;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik secara keseluruhan berjumlah 91 orang, terdiri dari :

- 32 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 13 orang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- 7 orang berstatus PPPK;
- 17 orang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL);
- 27 orang tenaga penyiar radio Suara Gresik dan call centre

**Rekapitulasi data pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin**

No	NAMA UNIT KERJA	ESELON			GOLONGAN PNS & CPNS PPPK, THL, dan Tenaga Ahli																		Jenis Kelamin		
		II	III	IV dan fun gsi ona I	IV/ c	IV/ b	IVa	III/ d	III/ c	III/ b	IIIa	II/ d	II/ c	II/ b	I / a	I / d	I/ c	I / b	Ia	IX	V	THL	Te na ga Ah li	L	P
1	Kepala Dinas	1					1																	1	
2	Sekretariat		1	3		1	1	1	2	3			2	1								10		11	10
3	Bidang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik		1				3			3	6											1		7	7
4	Bidang Sistem Statistik Dan Informasi Publik		1				1	2		1	5		3							6		5	19	23	19
5	Bidang Teknologi Dan Informatika		1				1	2		1	3		2								1	2		7	6
	JUMLAH	1	4	3		1	7	5	2	8	14		7	1								17		49	42

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori **Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga

akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menjadi menjadi lebih baik dan terarah.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2023 melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik Nomor : 700.04/1145/437.87/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Tindak Lanjut Hasil Reviu Atas Laporan Kinerja Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Terkait penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*benchmark* kinerja) telah ditindaklanjuti dengan mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional pada LKjIP tahun 2024;
2. Terkait informasi dalam laporan kinerja menginformasikan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja telah ditindaklanjuti dengan menjabarkan pada LKjIP tahun 2023 Bab IV telah tertuang realisasi penggunaan anggaran PAPBD dalam mencapai kinerja;
3. Terkait informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi telah ditindaklanjuti dengan bukti screenshot hasil laporan monev akuntabilitas bulanan tahun 2023 pada website SIAKRI namun belum melampirkan laporan budaya kerja;
4. Terkait Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dimana perlu ditambahkan screenshot rekap tunjangan pada aplikasi Sipantas dalam pemenuhan dokumen telah ditindaklanjuti dengan melampirkan bukti screenshot rekap tunjangan pada sipantas;
5. Terkait pengesahan dokumen (Renstra, Renja, LkjIP, Monev Rencana Aksi, Monev renja, Laporan Budaya Kerja) disertakan tanggal bulan dan tahunnya dan telah tertandatangani oleh Kepala Dinas telah ditindaklanjuti dengan melampirkan bukti screenshot dokumen terkait disertakan tanggal bulan dan tahun yang telah tertandatangani oleh Kepala Dinas.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar **87,30** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	26,08
b. Pengukuran Kinerja	30%	27,89
c. Pelaporan Kinerja	15%	13,33
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,00
J u m l a h	100%	87,30

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik secara umum telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan secara cukup memadai diantaranya Matriks Rencana Strategis (Renstra), dokumen Renstra yang telah diformalkan sudah di *upload* di *link* (<https://bit.ly/DokSAKIPWil3>), Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja oleh Kepala OPD kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Indikator tujuan/sasaran dan rencana aksi terkait penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun meliputi matriks Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dipublikasikan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan

dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah cukup menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan cukup realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dan dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan.

Dokumen Renstra telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah cukup dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,68** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **86,92%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

1. Target tahunan dalam Renstra pada indikator Indeks Pemerintah Digital masih terdapat rentang;
2. Target tahunan dalam Renstra pada indikator persentase pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan tidak terdapat perubahan (stagnan);
3. Dokumen PK PAPBD Tahun 2025 belum ditandatangani oleh Kepala Daerah;
4. Dokumen rencana aksi yang disajikan belum tertera tanggal pengesahan;

5. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang disajikan belum tertera tanggal pengesahan;
6. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disajikan belum diformalkan;
7. DPA yang disajikan belum diformalkan;
8. Dokumen capaian bulanan yang disajikan belum diformalkan.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menyusun ukuran kinerja secara formal berupa IKU yang dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran.

Pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi), pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang dan Pimpinan OPD selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja.

Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,89** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **92,98%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

1. Dokumen IKU yang disajikan tidak dilengkapi Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu dan belum

terformalkan;

2. Bukti *Screenshot* penggunaan aplikasi untuk pengukuran kinerja belum disajikan;
3. Bukti *screenshoot* rekap tunjangan pada sipantas belum disajikan sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan”;
4. Dokumen capaian bulanan yang disajikan belum diformalkan;
5. Dokumen Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disajikan belum diformalkan;
6. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang disajikan belum tertera tanggal pengesahan.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah menyusun laporan kinerja secara berkala dan telah diformalkan serta dipublikasikan.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, telah disusun cukup berkualitas sesuai dengan standar, mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) dan telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah

digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya namun belum selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **88,86%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

1. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang disajikan belum tertera tanggal pengesahan;
2. Bukti *screenshot approval* realisasi dan capaianan bulanan pada aplikasi SIAKRI belum disajikan;
3. Dokumen PK PAPBD Tahun 2025 belum ditandatangani oleh Kepala Daerah;
4. Laporan budaya kinerja organisasi belum di lampirkan.

4) Evaluasi atas Akauntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Pada LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan telah dievaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan telah menggunakan Teknologi Informasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimana dokumen tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2023 telah di *upload* pada link (<https://bit.ly/DokSAKIPWil3>), telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah memanfaatkannya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta

untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

1. Agar melengkapi dokumen DPA/DPPA, laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), laporan capaian bulanan yang telah diformalkan secara lengkap;
2. Agar melengkapi dokumen PK PAPBD Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah;
3. Agar melengkapi dokumen SK IKU dengan melampirkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu yang telah diformalkan;
4. Agar mencantumkan tanggal pengesahan dokumen rencana aksi yang telah diformalkan;
5. Agar melakukan penyesuaian target tahunan pada indikator Indeks Pemerintah Digital yang masih berupa rentang;
6. Agar diupayakan target tahunan pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi dan indikator persentase pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan terjadi peningkatan setiap tahunnya;
7. Agar melengkapi bukti *screenshot* rekap tunjangan pada aplikasi Sipantas dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan sebagai dasar pengukuran kinerja;
8. Agar melengkapi bukti dukung pengukuran kinerja berupa *screenshot* penggunaan aplikasi;
9. Agar melengkapi bukti *screenshoot approval* realisasi dan capaian bulanan pada aplikasi SIAKRI;
10. Agar menyusun laporan budaya kinerja organisasi.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan perolehan nilai sebesar **87,30** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

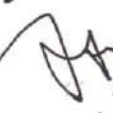
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik, 14 Oktober 2025

TIM EVALUASI :

1. SATRIYO UTOMO, S.Sos, M.Si. 
NIP. 19700708 199803 1 004
2. AJI PRAYITNO, ST 
NIP. 19691018 199103 1 002
3. ROSARI LASTIYONO U, SE. 
NIP. 19801007 201101 1 005
4. NUR WIJAYANTI, SE. 
NIP. 19940524 201903 2 012
5. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, S.H 
NIP. 19910322 201903 1 006
6. ISABEL MARETA V. D., A.Md.Ak. 
NIP. 20010324 202201 2 001

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan perolehan nilai sebesar **87,30** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik, 19 Oktober 2025

TIM EVALUASI :

1. SATRIYO UTOMO, S.Sos, M.Si. X
NIP. 19700708 199803 1 004
2. AJI PRAYITNO, ST
NIP. 19691018 199103 1 002
3. ROSARI LASTIYONO U, SE.
NIP. 19801007 201101 1 005
4. NUR WIJAYANTI, SE.
NIP. 19940524 201903 2 012
5. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, S.H
NIP. 19910322 201903 1 006
6. ISABEL MARETA V. D., A.Md.Ak.
NIP. 20010324 202201 2 001

III. PENUTUP

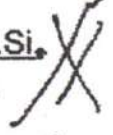
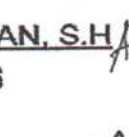
Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan perolehan nilai sebesar **87,30** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pemula Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik, Oktober 2025

TIM EVALUASI :

1. SATRIYO UTOMO, S.Sos, M.Si.
NIP. 19700708 199803 1 004 
2. AJI PRAYITNO, ST
NIP. 19691018 199103 1 002 
3. ROSARI LASTIYONO U, SE.
NIP. 19801007 201101 1 005 
4. NUR WIJAYANTI, SE.
NIP. 19940524 201903 2 012 
5. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, S.H.
NIP. 19910322 201903 1 006 
6. ISABEL MARETA V. D., A.Md.Ak.
NIP. 20010324 202201 2 001 